BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 147 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

24. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1397/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
25. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
26. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022 Nomor 15);
27. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya (APBK) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp.893.398.350.197.- bertambah sebesar Rp.48.773.073.877,- sehingga menjadi Rp.942.171.424.074,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah
   a. Semula Rp. 871.141.657.805,-
   b. Bertambah/ (berkurang) Rp. 19.250.176.012,-
   Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 890.391.833.817,-
2. Belanja daerah
   a. Semula Rp. 893.398.350.197,-
   b. Bertambah/ (berkurang) Rp. 48.773.073.877,-
   Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 942.171.424.074,-
3. Pembiayaan daerah
   a. Penerimaan pembiayaan
      1) Semula Rp. 25.756.692.392,-
      2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 30.177.879.032,-
   Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 55.934.571.424,-

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp. 3.500.000.000,-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. 654.981.167,-	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 4.154.981.167,-
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 51.779.590.257,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,-

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I — Ringkasan Penjabaran Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II — Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III — Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV — Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V — Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran VI — Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
7. Lampiran VII — Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII — Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBK yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 26 Oktober 2022 M
2 Rabiul Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

NURDIN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 28 Oktober 2022 M
2 Rabiul Akhir 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

SAFRUL MARYADI

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022 NOMOR 147

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 147 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 OKTOBER 2022

KABUPATEN ACEH JAYA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBK YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	83.941.747.500	76.535.937.026	(7.405.810.474)	9 %
4.1.01	Pajak Daerah	6.275.374.345	6.572.891.657	297.517.312	5 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	45.000.000	45.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	45.000.000	45.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	45.000.000	45.000.000	0	0 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.020.960.261	950.960.261	(70.000.000)	7 %
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.020.960.261	950.960.261	(70.000.000)	7 %
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.020.960.261	950.960.261	(70.000.000)	7 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	4.000.000	4.000.000	0	0 %
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	4.000.000	4.000.000	0	0 %
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	4.000.000	4.000.000	0	0 %
4.1.01.09	Pajak Reklame	71.870.000	244.833.750	172.963.750	241 %
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	60.330.000	148.833.750	88.503.750	147 %
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	60.330.000	148.833.750	88.503.750	147 %
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	11.540.000	96.000.000	84.460.000	732 %
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	11.540.000	96.000.000	84.460.000	732 %
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	2.905.446.438	3.100.000.000	194.553.562	7 %
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.905.446.438	3.100.000.000	194.553.562	7 %
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.905.446.438	3.100.000.000	194.553.562	7 %
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.608.432.526	1.608.432.526	(0)	0 %
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	930.447.672	780.447.672	(150.000.000)	16 %
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	930.447.672	780.447.672	(150.000.000)	16 %
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	651.010.156	651.010.156	0	0 %
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	651.010.156	651.010.156	0	0 %
4.1.01.14.28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	26.974.698	176.974.698	150.000.000	556 %
4.1.01.14.28.0001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	26.974.698	176.974.698	150.000.000	556 %
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	193.665.120	193.665.120	0	0 %
4.1.01.15.01	PBBP2	193.665.120	193.665.120	0	0 %
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	193.665.120	193.665.120	0	0 %
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	426.000.000	426.000.000	0	0 %
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	426.000.000	426.000.000	0	0 %
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	426.000.000	426.000.000	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	45.422.571.000	39.864.277.124	(5.558.293.876)	12 %
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	43.351.700.000	37.807.439.624	(5.544.260.376)	13 %
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	42.806.000.000	37.251.739.624	(5.554.260.376)	13 %
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	3.000.000.000	2.414.870.100	(585.129.900)	20 %
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	39.806.000.000	34.836.869.524	(4.969.130.476)	12 %
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	269.800.000	269.800.000	0	0 %
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	269.800.000	269.800.000	0	0 %
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	3.500.000	3.500.000	0	0 %
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	3.500.000	3.500.000	0	0 %
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	50.400.000	50.400.000	0	0 %
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	50.400.000	50.400.000	0	0 %
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	42.000.000	52.000.000	10.000.000	24 %

KABUPATEN ACEH JAYA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBK YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.1.01.05.02.0027	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	0	724	724	100 %
6.1.01.05.02.0028	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan	0	2.053.000	2.053.000	100 %
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0	34.884.140	34.884.140	100 %
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0	34.884.140	34.884.140	100 %
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	0	1.699.871.500	1.699.871.500	100 %
6.1.01.05.04.0001	Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	0	1.699.871.500	1.699.871.500	100 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**25.756.692.392**	**55.934.571.424**	**30.177.879.032**	**117 %**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**3.500.000.000**	**4.154.981.167**	**654.981.167**	**19 %**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.500.000.000	4.154.981.167	654.981.167	19 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.500.000.000	4.154.981.167	654.981.167	19 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.500.000.000	4.154.981.167	654.981.167	19 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.500.000.000	4.154.981.167	654.981.167	19 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**3.500.000.000**	**4.154.981.167**	**654.981.167**	**19 %**
	Pembiayaan Netto	**22.256.692.392**	**51.779.590.257**	**29.522.897.865**	**133 %**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0**	**0**	**0**	**340 %**

Pj. BUPATI ACEH JAYA

NURDIN

KABUPATEN ACEH JAYA

PENJABARAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 9.01 KEKHUSUSAN ACEH

Organisasi : 9.01.0.00.0.00.03 SEKRETARIAT BAITUL MAL

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
9 01 9.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	0	160.798.200	160.798.200		
9 01 9.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	0	147.165.000	147.165.000		
9 01 9.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0	13.633.200	13.633.200		
9 01 9.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 00	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**744.482.792**	**514.817.256**	**(229.665.536)**		
9 01 9.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.968.104	23.968.104	0		
9 01 9.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	23.968.104	23.968.104	0		
9 01 9.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.968.104	23.968.104	0		
9 01 9.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	23.968.104	23.968.104	0		
9 01 9.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	23.968.104	23.968.104	0		
9 01 9.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	720.514.688	490.849.152	(229.665.536)		
9 01 9.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	720.514.688	490.849.152	(229.665.536)		
9 01 9.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	720.514.688	490.849.152	(229.665.536)		
9 01 9.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 01	Belanja Barang	2.500.000	2.500.000	0		
9 01 9.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000	2.500.000	0		
9 01 9.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	718.014.688	488.349.152	(229.665.536)		
9 01 9.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	710.800.000	483.500.000	(227.300.000)		
9 01 9.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.214.688	4.849.152	(2.365.536)		
9 01 9.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**92.981.628**	**92.981.628**	**0**		
9 01 9.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.078.500	34.078.500	0		
9 01 9.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1	BELANJA OPERASI	34.078.500	34.078.500	0		
9 01 9.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	34.078.500	34.078.500	0		
9 01 9.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.078.500	2.078.500	0		
9 01 9.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.078.500	2.078.500	0		
9 01 9.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	32.000.000	32.000.000	0		
9 01 9.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32.000.000	32.000.000	0		
9 01 9.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	58.903.128	58.903.128	0		
9 01 9.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	58.903.128	58.903.128	0		
9 01 9.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	58.903.128	58.903.128	0		
9 01 9.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	58.903.128	58.903.128	0		
9 01 9.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	58.903.128	58.903.128	0		
Jumlah Belanja		**9.028.399.539**	**9.720.628.458**	**692.228.919**		
Total Surplus/(Defisit)		**(9.028.399.539)**	**(9.720.628.458)**	**(692.228.919)**		
0 00 9.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**0**	**0**	**0**		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		**0**	**0**	**0**		

Pj. BUPATI ACEH JAYA

NURDIN

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPK PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
		[?]	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat Spesifikasi : Rehabilitasi Masjid At-Taqwa Gp. Mukhan Kec. Jaya	138.000.000	138.000.000	0
		[?]	Pembangunan Masjid Besar Spesifikasi : Lanjutan Pembangunan Masjid Besar Baiturrahman Kec. Jaya	480.000.000	480.000.000	0
		[?]	Pembangunan Masjid Besar Spesifikasi : Lanjutan Pembangunan Masjid Besar Baiturrahman Kec. Pasie Raya	672.000.000	672.000.000	0
		[?]	Pembangunan Masjid Spesifikasi : Pembangunan Masjid Jamik An-Nur Gp. Dayah Baro Kec. Krueng Sabee	186.000.000	186.000.000	0
	[#] Perencanaan Teknis Peningkatan Sarana dan Prasarana Agama					
		[?]	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat Spesifikasi : Perencanaan Teknis Pekerjaan Penunjukan Langsung Fase II	23.400.000	23.400.000	0
		[?]	Perencanaan Teknis Spesifikasi : Perencanaan Teknis Lanjutan Pembangunan Masjid Jamik Baiturrahim Gp. Jeumpheuk Kec. Sampoiniet (DAU)	15.000.000	15.000.000	0
		[?]	Perencanaan Teknis Spesifikasi : Perencanaan Teknis Pekerjaan Penunjukan Langsung	30.562.200	30.562.200	0
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan			**5.608.353.547**	**5.718.897.547**	**110.544.000**
	Jumlah Hibah Pada SKPK			**7.108.353.547**	**7.470.648.109**	**362.294.562**
	Jumlah Total			**58.690.050.324**	**66.740.516.955**	**8.050.466.631**

Pj. BUPATI ACEH JAYA

NURDIN

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPK PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan			**22.248.000**	**22.248.000**	**0**
	1.06.06.2.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi					
		[?]	Seng Spesifikasi : 7 Inch	12.350.000	12.350.000	0
		[?]	Tripleks Spesifikasi : Uk. 3 mm	13.585.000	13.585.000	0
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan			**25.935.000**	**25.935.000**	**0**
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPK			**613.261.700**	**613.258.800**	**(2.900)**
	2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN					
	2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					
		[?]	Bibit Cabe Rawit Lokal Spesifikasi :	0	22.000.000	22.000.000
		[?]	Bibit Cabe Merah Lokal Spesifikasi :	0	22.000.000	22.000.000
		[?]	Bibit Cabe Merah Lokal Spesifikasi :	0	20.000.000	20.000.000
		[?]	Bibit Cabe Rawit Lokal Spesifikasi :	0	20.000.000	20.000.000
		[?]	Bibit Cabe Rawit Lokal Spesifikasi :	0	18.000.000	18.000.000
		[?]	Bibit Cabe Merah Lokal Spesifikasi :	0	18.000.000	18.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan			**0**	**120.000.000**	**120.000.000**
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPK			**0**	**120.000.000**	**120.000.000**
	9.01.0.00.0.00.03.0000 SEKRETARIAT BAITUL MAL					
	9.01.04.2.03.08 Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq					
		[?]	Rumah Layak Huni Type B Spesifikasi : Lantai Cor +WC/KM	1.620.000.000	0	(1.620.000.000)
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan			**1.620.000.000**	**0**	**(1.620.000.000)**
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPK			**1.620.000.000**	**0**	**(1.620.000.000)**
	Jumlah Total			**7.880.977.700**	**6.550.974.800**	**(1.330.002.900)**

Pj. BUPATI ACEH JAYA

NURDIN

KABUPATEN ACEH JAYA
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Organisasi : Dinas Syariat Islam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)			LOKASI
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
9.01.02	**PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH**	**4.424.887.348**	**4.424.887.348**	-	
9.01.02.2.04	**Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam**	**4.424.887.348**	**4.424.887.348**	-	
9.01.02.2.04.11	**Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan**	**4.424.887.348**	**4.424.887.348**	-	
9.01.02.2.04.11 5	**BELANJA DAERAH**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	-	Kabupaten Aceh Jaya
9.01.02.2.04.11 5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	-	
9.01.02.2.04.11 5.1.05	**Belanja Hibah**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	-	
9.01.02.2.04.11 5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang BerbadanHukum Indonesia	1.000.000.000	1.000.000.000	-	
9.01.02.2.04.11 5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat SosialKemasyarakatan	1.000.000.000	1.000.000.000	-	
9.01.02.2.04.11 5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat SosialKemasyarakatan	1.000.000.000	1.000.000.000	-	Kabupaten Aceh Jaya
	- Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an (OTSUS)	500.000.000	500.000.000	-	
	- Pengadaan Sajadah Gulung (OTSUS)	500.000.000	500.000.000	-	
9.01.02.2.04.13 5	**BELANJA DAERAH**	**3.424.887.348**	**3.424.887.348**	-	
9.01.02.2.04.13 5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.424.887.348**	**3.424.887.348**	-	
9.01.02.2.04.13 5.1.05	**Belanja Hibah**	**3.424.887.348**	**3.424.887.348**	-	
9.01.02.2.04.13 5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.424.887.348	3.424.887.348	-	
9.01.02.2.04.13 5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.424.887.348	3.424.887.348	-	
9.01.02.2.04.13 5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela danSosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.424.887.348	3.424.887.348	-	
	- Lanjutan Pembangunan Masjid Besar Al Ihsan Kec. Sampoiniet	724.887.348	724.887.348	-	Kec. Sampoiniet
	- Lanjutan Pembangunan Masjid Besar Baitul Muttaqin Kec. Darul Hikmah	900.000.000	900.000.000	-	Kec. Darul Hikmah
	- Lanjutan Pembangunan Masjid Besar Baiturrahman Kec. Pasie Raya	700.000.000	700.000.000	-	Kec. Pasie Raya
	- Lanjutan Pembangunan Masjid Besar Baiturrahman Kec. Jaya	500.000.000	500.000.000	-	Kec. Jaya
	- Pembangunan Masjid Besar Babul Mafazah Kec. Indra Jaya	600.000.000	600.000.000	-	Kec. Indra Jaya
	JUMLAH	**4.424.887.348**	**4.424.887.348**	-	

Pj. BUPATI ACEH JAYA

NURDIN

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 147 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 OKTOBER 2022

KABUPATEN ACEH JAYA
RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/
TAMBAHAN DBH MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN
RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Organisasi : .....

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	LOKASI
1	2	3	4
	NIHIL		

Pj. BUPATI ACEH JAYA

NURDIN

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 147 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 OKTOBER 2022

KABUPATEN ACEH JAYA
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Organisasi : .....

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	LOKASI
1	2	3	4
	NIHIL		

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

NURDIN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 147 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 OKTOBER 2022

KABUPATEN ACEH JAYA
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
PADA DAERAH PERBATASAN DALAM RANCANGAN QANUN TENTANG APBK DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBK
DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Program Prioritas Perbatasan Negara	Uraian						Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBK			Jumlah (Rp)
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Transfer		Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	
		Uraian	Lokasi (Kecamatan)	Uraian	Lokasi (Kecamatan)	Uraian	Lokasi (Kecamatan)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				NIHIL							

Pj. BUPATI ACEH JAYA

NURDIN